



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MASJURING
KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, dipandang perlu melakukan pemekaran Desa;

b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi Desa, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah Desa, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Bonder perlu dilakukan pembentukan Desa Persiapan Masjuring;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Pembentukan Desa Persiapan Masjuring Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

21

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MASJURING KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten Lombok Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja

kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dusun adalah bagian dari wilayah pemerintahan Desa yang terdiri dari beberapa Rukun warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT).
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian wilayah Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa diluar Desa yang telah ada.
12. Desa persiapan adalah pembentukan Desa baru yang masih dalam proses untuk menjadi Desa definitif.
13. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Batas Alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.
15. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK

DAN BATAS WILAYAH DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Masjuring Kecamatan Praya Barat.

Bagian Kedua
Cakupan Wilayah dan Jumlah Penduduk

Pasal 3

- (1) Desa Persiapan Masjuring berasal dari bagian wilayah Desa Bonder Kecamatan Praya Barat yang memiliki luas wilayah 350 Ha dan jumlah penduduk 4.768 jiwa;
- (2) Cakupan wilayah kerja Desa Persiapan Masjuring sebagai berikut:
 - a. Dusun Buntimba dengan jumlah penduduk 405 jiwa;
 - b. Dusun Batu Mulud dengan jumlah penduduk 369 jiwa;
 - c. Dusun Barebelik dengan jumlah penduduk 749 jiwa;
 - d. Dusun Masjuring dengan jumlah penduduk 944 jiwa;
 - e. Dusun Balibe dengan jumlah penduduk 490 jiwa;
 - f. Dusun Jurang Are 1 dengan jumlah penduduk 335 jiwa;
 - g. Dusun Jurang Are 2 dengan jumlah penduduk 767 jiwa; dan
 - h. Dusun Buras dengan jumlah penduduk 709 jiwa.

Pasal 4

Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digambarkan dalam sketsa Desa yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dengan dibentuknya Desa Persiapan Masjuring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah administrasi Desa Bonder meliputi :

- a. Dusun Kelantih dengan jumlah penduduk 671 jiwa;
- b. Dusun Kebon Rongkep dengan jumlah penduduk 336 jiwa;
- c. Dusun Perempung dengan jumlah penduduk 672 jiwa;
- d. Dusun Kelantah dengan jumlah penduduk 225 jiwa;
- e. Dusun Lendang dengan jumlah penduduk 168 jiwa;
- f. Dusun Dasan Tengah dengan jumlah penduduk 472 jiwa;
- g. Dusun Bonder dengan jumlah penduduk 1.165 jiwa;
- h. Dusun Ular Naga dengan jumlah penduduk 441 jiwa;
- i. Dusun Selong Paok dengan jumlah penduduk 483 jiwa;
- j. Dusun Lamet dengan jumlah penduduk 822 jiwa;
- k. Dusun Sangkong dengan jumlah penduduk 532 jiwa; dan
- l. Dusun Bagik Nur dengan jumlah penduduk 290 jiwa.

Bagian Ketiga
Batas Wilayah Desa

Pasal 6

Wilayah Desa Persiapan Masjuring Kecamatan Praya Barat, berbatasan dengan wilayah desa lain yang terdiri dari :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Penujak Kecamatan Praya Barat;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Penujak dan Desa Kateng Kecamatan Praya Barat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bonder (desa induk) Kecamatan Praya Barat;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Setanggor dan Desa tanak Rarang Kecamatan Praya Barat.

BAB III

PENETAPAN DESA PERSIAPAN

Pasal 7

Penetapan Desa Persiapan Masjuring serta pelantikan penjabat kepala Desa dilakukan oleh Bupati setelah diterbitkannya surat Gubernur Nusa Tenggara Barat yang memuat Kode register Desa persiapan Masjuring

Pasal 8

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Masjuring Kecamatan Praya Barat, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 9

Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Persiapan Masjuring berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan evaluasi atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan Masjuring dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun sejak Penetapan Desa Persiapan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan Bupati untuk menetapkan status Desa Persiapan Masjuring menjadi Desa definitif.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan akibat dibentuknya Desa Persiapan Masjuring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sepanjang menjadi kewenangan Pemerintah Desa




dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Bonder.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya,
pada tanggal 21 - 06 - 2021
BUPATI LOMBOK TENGAH, 

 H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya,
pada tanggal 2021
PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. MOH. NAZILI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 NOMOR

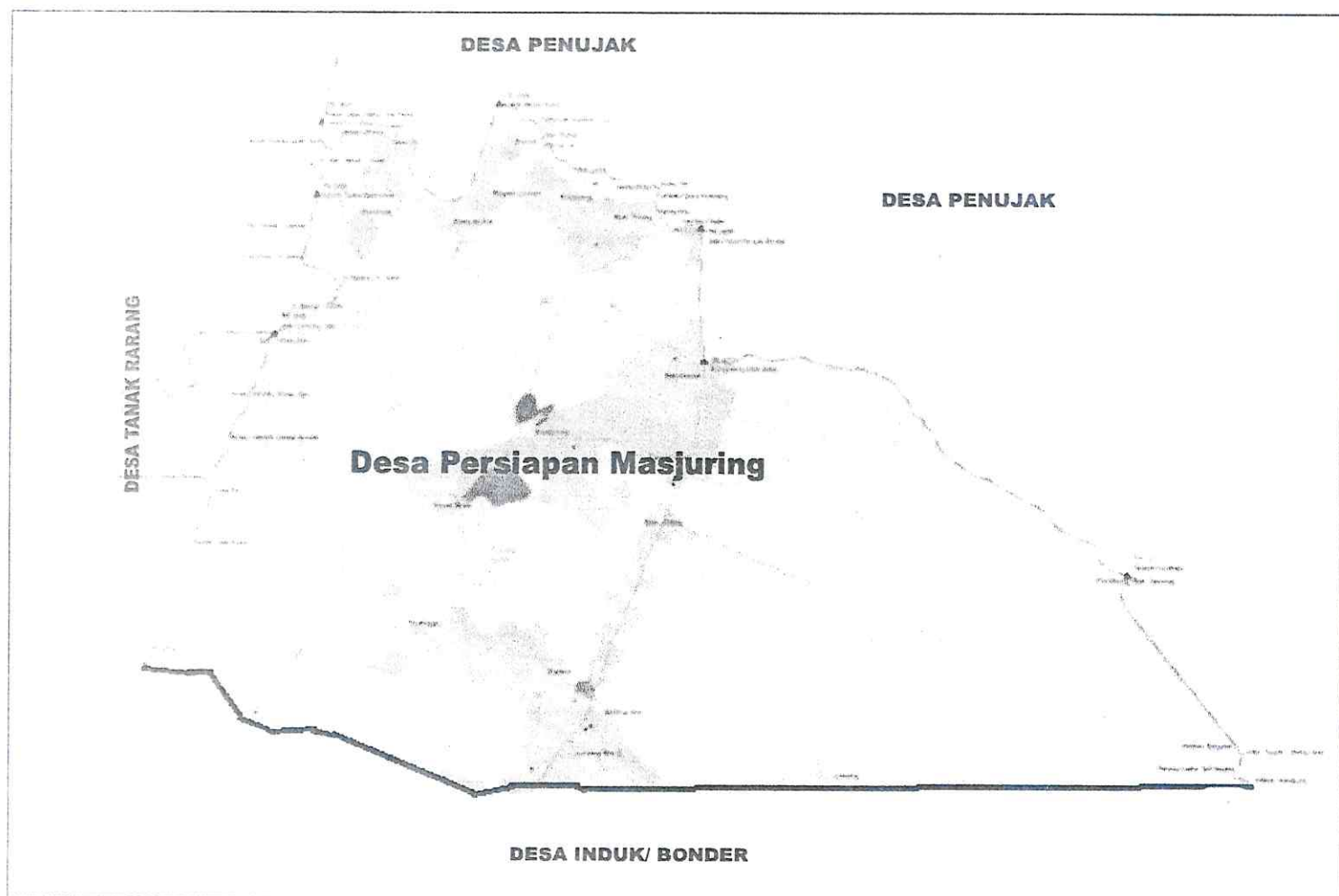
Lampiran Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 48 TAHUN 2021

Tanggal : 21 JUNI 2021

Tentang : PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MASJURING KECAMATAN
PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Peta Cakupan Wilayah
Desa Persiapan Masjuring



BUPATI LOMBOK TENGAH

H. LALU PATHUL BAHRI